

**EVALUASI KETEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
DALAM PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI NAGARI SIRUKAM,
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang*



ANGEL HALSYA DWI QALBI

NIM/BP : 21042244/2021

DEPERTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Ketepatan Pelaksanaan Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam
Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) Di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok

Nama : Angel Halsya Dwi Qalbi

NIM/TM : 21042244/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

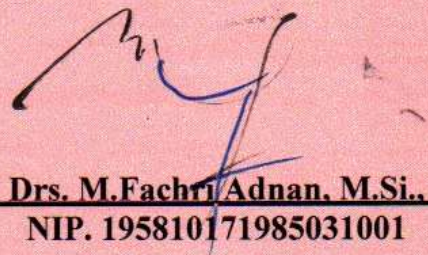
Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 November 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Prof. Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D
NIP. 195810171985031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat 07 November 2025 Pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB

**Evaluasi Ketepatan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) Dalam Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok**

Nama : Angel Halsya Dwi Qalbi
TM/NIM : 2021/21042244
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

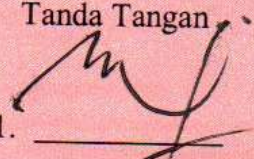
Padang, 24 November 2025

Tim Penguji :

Nama

Tanda Tangan

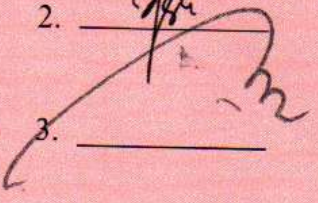
Ketua : Prof. Drs. M Fachri Adnan M.Si, Ph.D

1. 

Anggota : Dr. Siska Sasmita, S.IP, MPA

2. 

Anggota : Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D

3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP,


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angel Halsya Dwi Qalbi

NIM/TM : 21042244/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Evaluasi Ketepatan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok” adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 November 2025
Saya yang menyatakan


Angel Halsya Dwi Qalbi
NIM. 21042244

ABSTRAK

Angel Halsya Dwi Qalbi (21042244): *Evaluasi Ketepatan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, yang memiliki rumah tidak layak huni. Sebagai upaya peningkatan kualitas hunian, pemerintah melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan tujuan memberikan bantuan stimulan, meningkatkan kualitas fisik rumah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain terkait pengawasan penggunaan material, partisipasi masyarakat, serta kesesuaian data penerima manfaat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan pelaksanaan Program BSPS dalam meningkatkan kualitas hunian MBR di Nagari Sirukam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program secara mendalam dari perspektif aparat nagari, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), penerima manfaat, dan masyarakat terdampak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BSPS di Nagari Sirukam secara umum telah tepat dan berjalan dengan baik. Proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara berjenjang sehingga memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok MBR yang membutuhkan. Program ini terbukti meningkatkan kualitas fisik hunian melalui perbaikan struktur, kelayakan, serta keamanan rumah. Dampak lanjutannya juga terlihat pada meningkatnya kenyamanan, kesehatan lingkungan tempat tinggal penerima manfaat. Selain itu, pendekatan swadaya mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat nilai gotong royong. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan kendala pada aspek pengawasan material, variasi tingkat keterlibatan warga, serta beberapa hambatan administratif yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pengawasan, pendampingan yang lebih intensif, dan perbaikan mekanisme administrasi untuk mengoptimalkan ketepatan program di masa mendatang.

Kata Kunci: Program BSPS, kualitas hunian, masyarakat berpenghasilan rendah, Nagari Sirukam, ketepatan

KATA PENGANTAR



Segala puji kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul ***“Evaluasi Ketepatan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok”***. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibuk Dra Fitri Eriyanti, M. Pd, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP, MPA dan Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta (Bapak Halfendra dan Ibu Syaflinda) yang dengan penuh cinta, kasih sayang, doa, motivasi, serta pengorbanan tiada henti selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dan semangat penulis dalam menempuh dan menyelesaikan studi ini. Segala jerih payah, kasih sayang, dan doa tulus yang telah diberikan, serta perjuangan yang menjadi pijakan penulis untuk sampai pada tahap ini, tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apapun. Sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi.
7. Kepada saudara tercinta (Abang Gabriel dan Cheysha) yang senantiasa melimpahkan semangat, dukungan tulus, dan pengorbanan. Kehadiran serta kontribusi kalian telah menjadi dorongan terbesar dan sumber kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini hingga tuntas. Segala kebaikan, jerih payah, dan bantuan yang telah kalian berikan tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apa pun jua. Semoga kalian selalu sehat dan dilimpahi kesuksesan.

8. Kepada teman-teman seperjuangan saya (Anjel, Tiara, Sri, Silvira) terima kasih atas setiap dukungan, kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita bangun bersama. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini menjadi lebih bermakna dan menyenangkan.
9. Seluruh rekan-rekan Departemen Ilmu Administrasi Negara yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita bangun bersama.
10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah seseulit apapun proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian dan patut dibanggakan untuk diri ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Aamiin ya rabbal alamin.

Padang, Oktober 2025

**Angel Halsya Dwi Qalbi
21042244**

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKAAN	13
A. Kajian Teoritis.....	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan	29
C. Kerangka Konseptual	33B
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Fokus Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Informan Penelitian	35
E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Uji Keabsahan Data	39
H. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Temuan Umum.....	44
B. Temuan Khusus.....	56
C. Pembahasan.....	103
BAB V PENUTUP	113

A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
LAMPIRAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	36
Tabel 4.1 Penggunaan Lahan di Nagari Sirukam	45
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Nagari Sirukam	47
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk MBR Nagari Sirukam	47
Tabel 4.4 Jumlah Penerima Bantuan BPS di Nagari Sirukam Tahun 2018–2024	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabuoaten Solok	46
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Nagari Sirukam	49
Gambar 4.3 Kondisi Rumah Penerima BSPS Sebelum di Perbaiki	66
Gambar 4.4 Kondisi Rumah Penerima BSPS Sesudah di Perbaiki.....	66
Gambar 4.5 Pemasangan Plang BSPS Menandakan Penyelesaian Program dan Rumah Siap	70
Gambar 4.6 Surat Pengajuan dari Wali Nagari	73
Gambar 4.7 Kegiatan Maurak Rabo Nagari Sirukam	77
Gambar 4.8 Kegiatan Musyawarah Kelompok Penerima Bantuan (KPB)	78
Gambar 4.9 Kegiatan Sosialisasi Program BSPS di Nagari Sirukam	85
Gambar 4.10 Absensi Sosialisasi Program BSPS	85
Gambar 4.11 Surat Tugas TFL	87
Gambar 4.12 Kegiatan Sosialisasi Program BSPS bersama Niniak Mamak dan Tokoh Adat	94
Gambar 4.13 Cuplikan Keputusan Menteri PUPR Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran Nilai dan Lokasi BSPS Tahun Anggaran 2022	97
Gambar 4.14 Daftar Calon Penerima BSPS	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perumahan dan permukiman memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang tumbuh kembang manusia, cerminan keteraturan sosial, serta penggerak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi. Idealnya, pembangunan perumahan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan dukungan regulasi dan fasilitas dari pemerintah. Rumah sebagai kebutuhan dasar memiliki makna personal sekaligus sosial, serta menjadi faktor penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat (Farida, 2020).

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan hunian layak. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, terdapat sekitar 26,9 juta rumah tangga yang belum menempati hunian layak, mayoritas berasal dari kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (Kementerian PUPR, 2024). Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan intervensi pemerintah dalam mewujudkan hunian layak dan merata.

Pentingnya pemenuhan kebutuhan perumahan ditegaskan dalam regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa kesejahteraan

mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial (Nisa & Ndoda, 2024).

Meskipun regulasi telah jelas, kenyataannya banyak MBR belum memiliki akses terhadap hunian layak. Hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya pendapatan, tingginya harga tanah dan bahan bangunan, keterbatasan akses KPR, serta status legalitas lahan yang belum memadai (Lufti et al., 2023). Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa tinggal di rumah semi permanen, lingkungan kumuh, atau menempati hunian tanpa jaminan kenyamanan. Padahal, kualitas perumahan sangat memengaruhi kesejahteraan fisik, psikologis, hingga mobilitas sosial ekonomi (Sattarudin, 2019).

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni sekaligus mendorong pembangunan rumah baru bagi MBR melalui prinsip pemberdayaan masyarakat. Bantuan bersifat stimulan, sehingga penerima diharapkan berkontribusi dalam bentuk tenaga, dana, maupun keterlibatan aktif (Waluyo, 2021). Pada tahun 2023, BSPS menargetkan perbaikan 150.421 unit rumah dengan anggaran Rp 3,34 triliun, dan berhasil merealisasikan 149.539 unit atau 99,4% Kementerian PUPR, 2023 dalam (Kontan.co.id, 2023).

Dasar hukum program ini adalah Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2018, yang mengatur sasaran MBR penerima bantuan, mekanisme penyaluran, serta bentuk bantuan berupa Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs). PKRS diberikan kepada

masyarakat yang sudah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni, sedangkan PBRS diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni atau rumahnya tidak bisa diperbaiki lagi. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak seperti Satuan Kerja Perumahan, fasilitator lapangan, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari partisipasi masyarakat serta dampak sosial yang ditimbulkan, seperti peningkatan gotong royong dan kemandirian kelompok.

Di Kabupaten Solok, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan yang berimplikasi pada pemenuhan hunian. Data PPID Kabupaten Solok (2024) mencatat persentase penduduk miskin meningkat dari 7,13% (27,33 ribu jiwa) pada 2023 menjadi 7,31% (28,18 ribu jiwa) pada 2024. Selain itu, sekitar 30.046 KK miskin masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) (Antara Sumbar, 2021). Kondisi ini menggambarkan urgensi program BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Salah satu daerah penerima BSPS adalah Nagari Sirukam di Kabupaten Solok. Mayoritas penerima bantuan di nagari ini memperoleh jenis PKRS, karena sebagian besar masyarakat masih memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang mendapatkan PBRS, terutama bagi mereka yang benar-benar belum memiliki rumah layak atau kondisi rumahnya tidak bisa lagi ditingkatkan kualitasnya.

Nagari Sirukam telah menerima BSPS sejak 2018 hingga 2024, tercatat 160 rumah memperoleh bantuan dari total sekitar 400 rumah tidak layak huni,

artinya lebih dari separuh keluarga masih belum tersentuh program. Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap, yaitu 50 unit pada 2018, 50 unit pada 2020, dan masing-masing 20 unit pada 2022 dan 2024.

Meskipun bantuan telah disalurkan, fenomena di lapangan menunjukkan deviasi antara kebijakan dan realitas. Beberapa penerima bukan berasal dari kelompok MBR, ada yang memiliki lebih dari satu rumah, sementara warga miskin lain gagal menerima bantuan karena keterbatasan swadaya atau status tanah.

Observasi awal dan data yang dihimpun mengindikasikan adanya ketidaktepatan sasaran, di mana beberapa penerima bantuan bukan berasal dari kelompok MBR sebagaimana diatur, bahkan ditemukan penerima yang memiliki lebih dari satu rumah. Sementara itu, masyarakat miskin lainnya yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terpinggirkan karena tidak mampu memenuhi syarat swadaya atau mengalami sengketa lahan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan ini, peneliti melakukan wawancara awal dengan beberapa pihak terkait.

Permasalahan ketidaktepatan sasaran ini didukung oleh persepsi masyarakat setempat. Salah satu warga Nagari Sirukam yang tinggal di sekitar penerima BSPS, Ibu Linda, menyampaikan pandangannya mengenai kondisi di lapangan:

“...Saya tahu beberapa rumah yang dapat bantuan, bahkan katanya punya rumah lainnya yang layak. Beberapa di antaranya juga bukan dari keluarga yang benar-benar tidak mampu, malah ada yang punya usaha lumayan besar. Sementara masih banyak rumah yang

seharusnya layak mendapatkan bantuan namun tidak terpilih sebagai penerima”

(Wawancara dengan Ibu Linda, Warga Nagari Sirukam, 15 April 2025)

Pernyataan Ibu Linda ini dikonfirmasi oleh Bapak Rian, seorang Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS di Nagari Sirukam. Dalam wawancara, Bapak Rian mengakui adanya masukan dari masyarakat terkait kelayakan penerima bantuan. Beliau menjelaskan bahwa:

“...ada penerima yang seharusnya tidak termasuk prioritas, sementara warga lain yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan”

(Wawancara dengan Bapak Rian, Tenaga Fasilitator BSPS Nagari Sirukam, 17 April 2025)

Lebih lanjut, Bapak Rian menguraikan bahwa tantangan ini seringkali disebabkan oleh ketergantungan proses penetapan pada kelengkapan dokumen administratif dan kesiapan swadaya. Meskipun TFL berpegang pada prosedur, ia menambahkan bahwa:

“...keterbatasan data dan realitas sosial di lapangan membuat tidak semua keputusan memuaskan semua pihak yang menjadi tantangan dalam memastikan keadilan program”

(Wawancara dengan Bapak Rian, Tenaga Fasilitator BSPS Nagari Sirukam, 17 April 2025)

Selain itu, data mengenai cakupan program juga menjadi perhatian. Bapak Romi, selaku Wali Nagari Sirukam, mengungkapkan kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi bantuan di wilayahnya:

“...Di Nagari Sirukam masih terdapat sekitar 400 rumah tidak layak huni, namun sejak 2018 hingga kini baru sekitar 120 unit yang mendapat bantuan. Masih ada sekitar 280 rumah yang belum tersentuh, sebagian besar karena keterbatasan kuota bantuan, serta kendala administratif seperti tanah yang belum bersertifikat dan ketidaksiapan swadaya masyarakat”

(Wawancara dengan Bapak Romi, Wali Nagari Sirukam, 14 Februari 2025)

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program dan realisasi aktualnya, serta mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan BSPS di tingkat lokal. Situasi ini menimbulkan sejumlah kontradiksi dan kejanggalan yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Misalnya, meskipun regulasi terbaru (Permen PUPR No. 7/2018) telah menetapkan kriteria ketat bahwa penerima bantuan harus menempati satu-satunya rumah tidak layak huni dan memiliki tanah dengan status hukum yang sah, di lapangan justru terjadi pelanggaran terhadap kriteria tersebut. Beberapa calon penerima dengan kondisi paling rentan gagal dibantu karena tidak mampu berswadaya atau memiliki tanah bersengketa, padahal mereka termasuk kelompok yang paling membutuhkan. Hal ini menimbulkan paradoks, karena aturan yang dirancang untuk melindungi MBR justru menjadi penghalang bagi mereka yang paling rentan.

Permasalahan kesenjangan antara kebijakan dengan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Nagari Sirukam juga diungkapkan oleh Bapak Alfion, Kasi Kesejahteraan Nagari Sirukam. Beliau menyampaikan:

“...Dalam pelaksanaan BSPS banyak kendala, terutama masalah tanah yang belum bersertifikat atau belum atas nama sendiri, serta ketidakmampuan warga untuk berswadaya. Karena itu, meski rumah mereka tidak layak, beberapa calon penerima akhirnya batal mendapat bantuan”

(Wawancara dengan Bapak Anto, Kasi Kesejahteraan Nagari Sirukam, 24 Februari 2025).

Nagari Sirukam memiliki karakteristik masyarakat agraris yang kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2016), sekitar 50,27 persen penduduk bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, diikuti oleh sektor perdagangan dan perkebunan sebesar 18,01 persen. Sebagian besar masyarakat, khususnya perempuan, bekerja sebagai petani sawah dan buruh tani karena kondisi lahan yang luas dan didukung sistem irigasi yang memadai (Putri, 2021). Komoditas utama yang diusahakan meliputi padi, coklat, kayu manis, dan cengkeh. Meski demikian, sebagian kecil masyarakat juga bekerja di sektor informal non-agraris seperti pedagang kecil, buruh harian, dan karyawan swasta. Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian dengan keterbatasan akses terhadap informasi dan pelayanan publik menyebabkan sebagian besar penduduk termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Kearifan lokal seperti gotong royong dan musyawarah masih dijunjung tinggi, namun program seperti BSPS yang mengandalkan partisipasi dan swadaya sering menghadapi hambatan bila tidak disertai dukungan struktural yang memadai. Oleh karena itu sangat penting untuk memandang pelaksanaan program dalam konteks budaya, sosial, dan kondisi ekonomi lokal, agar intervensi lebih tepat sasaran.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih mengacu pada Permen PUPR No. 13/2016 atau No. 39/2015, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika kebijakan terbaru sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 7 Tahun 2018. Selain itu, minim

kajian yang secara eksplisit mengevaluasi ketidaksesuaian antara kriteria ideal dalam regulasi tersebut dengan realitas pelaksanaan di lapangan, seperti kasus penerima yang memiliki rumah ganda, atau calon penerima yang gagal dibantu karena tanah bersengketa dan tidak mampu berswadaya. Hal ini membuka ruang baru dalam literatur kebijakan perumahan untuk menggali lebih dalam dampak administratif terhadap kelompok paling rentan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, dengan fokus pada kesesuaian antara kebijakan dalam Permen PUPR No. 7 Tahun 2018 dan praktik di lapangan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria evaluasi William N. Dunn (2003) yaitu kriteria ketepatan. Dengan menggunakan 4 standar ketepatan oleh Mahesh Patel dan Craig Russon (2000). Kriteria ini dipilih karena mampu menilai program tidak hanya dari aspek normatif dan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dari persepsi masyarakat penerima manfaat serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk mendukung perbaikan kebijakan di masa mendatang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak sepenuhnya tepat sasaran, karena terdapat penerima bantuan yang tidak tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ada penerima yang

memiliki lebih dari satu rumah, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permen PUPR No. 7 Tahun 2018.

2. Calon penerima yang tergolong sangat membutuhkan justru gagal menerima bantuan karena kendala administratif, seperti tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah atau keterbatasan dalam memenuhi komponen dana swadaya.
3. Keterbatasan kuota bantuan dari pemerintah pusat menyebabkan banyak rumah tangga yang memenuhi kriteria layak menerima bantuan tidak terakomodasi, meskipun telah diusulkan oleh pihak pemerintah nagari.
4. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal masyarakat, seperti tradisi gotong royong, jenis pekerjaan informal, dan kepemilikan lahan secara adat, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program di tingkat lokal.

C. Batasan Masalah

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, pembahasan dibatasi hanya pada pelaksanaan bantuan jenis Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dalam Program BSPS serta ketepatannya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat penerima di Nagari Sirukam. Penelitian ini tidak membahas jenis

bantuan BSPS lainnya, aspek teknis pembangunan, maupun program perumahan di luar BSPS.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Nagari Sirukam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Nagari Sirukam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, terutama yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan evaluasi kebijakan. Secara khusus, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai evaluasi pelaksanaan program bantuan pemerintahan dalam peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Pelaksana Program

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), khususnya di Nagari Sirukam. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kelemahan dalam implementasi program serta menyusun strategi perbaikan yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

b. Bagi Masyarakat Penerima Manfaat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi aktif dan peran keswadayaan dalam mendukung keberhasilan program BSPS. Pemahaman ini diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam proses pengajuan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan bantuan perumahan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang evaluasi program perumahan, khususnya terkait keterlibatan masyarakat, ketepatan sasaran, dan kebijakan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Ketepatan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Standar Kegunaan (Utility)

Program BSPS di Nagari Sirukam terbukti relevan dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama bagi keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni. Program ini memberikan manfaat langsung secara fisik, sosial, dan ekonomi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah, gotong royong, dan nilai-nilai budaya lokal seperti maurak rabo.

2. Standar Kelayakan (Feasibility)

Pelaksanaan BSPS di Nagari Sirukam layak secara teknis, administratif, dan sosial. Efisiensi penggunaan dana, mekanisme pengawasan berjenjang, serta adaptasi terhadap kondisi lokal dan budaya masyarakat memastikan program berjalan realistis dan dapat dijalankan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya tenaga, dana, dan waktu memperkuat keberhasilan program.

3. Standar Kepatutan (Propriety)

Program BSPS dijalankan dengan sopan, etis, dan menghormati norma serta budaya setempat. Program ini terbuka dan transparan, ada etika pelayanan, musyawarah, serta mekanisme untuk menampung keluhan masyarakat. Penerima bantuan juga berperan aktif dan bertanggung jawab, sehingga program diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan kata lain, pelaksanaan program sesuai dengan prinsip menghormati hak, nilai, dan budaya masyarakat.

4. Standar Ketepatan (Accuracy)

Pelaksanaan BSPS di Nagari Sirukam tepat sasaran dan akurat. Hal ini didukung oleh pendataan yang berjenjang, verifikasi penerima, serta pengawasan penggunaan dana secara transparan. Program ini berhasil meningkatkan kualitas rumah, kesejahteraan ekonomi, dan hubungan sosial masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif dan prinsip swadaya, program sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Secara keseluruhan, Program BSPS di Nagari Sirukam dapat dinilai tepat dalam pelaksanaan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hunian, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian nilai sosial budaya lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, diharapkan dapat meningkatkan kuota penerima dan besaran dana bantuan program BSPS agar pemerataan manfaat dapat tercapai lebih optimal. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pendataan dan verifikasi penerima melalui mekanisme berbasis data terbaru yang melibatkan masyarakat secara langsung.
2. Bagi Pemerintah Nagari Sirukam, disarankan untuk terus menjaga transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program, mulai dari pendataan hingga evaluasi. Pemerintah nagari juga diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih intensif agar seluruh warga memahami mekanisme program dan mengurangi potensi kesalahpahaman atau kecemburuan sosial. Selain itu, pemerintah nagari disarankan untuk memperbarui dan mengunggah profil Nagari Sirukam pada laman web resmi atau portal informasi daring, agar data dan profil nagari dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, peneliti, maupun instansi yang memerlukan informasi terkait.
3. Bagi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), penting untuk memperkuat pendampingan tidak hanya pada tahap pembangunan, tetapi juga pascapembangunan. Pemantauan terhadap kondisi rumah setelah selesai dibangun dapat menjadi evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas hasil program.
4. Bagi Masyarakat Penerima dan Non Penerima, diharapkan untuk terus menjaga semangat gotong royong dan kesadaran kolektif dalam

meningkatkan kualitas hunian serta menjaga lingkungan permukiman agar tetap sehat, aman, dan nyaman.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk meneliti keberlanjutan program BSPS, khususnya dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan, dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung.